



## Gubernur Kalbar Harap Semua Terealisasi Maksimal

**PONTIANAK, SP** - Dalam rangka reses masa persidangan V tahun 2021-2022, Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalbar. Rombongan yang dipimpin Ketua Komisi V DPR Lasarus tersebut melakukan pertemuan dengan Gubernur Kal-

bar, Sutarmidji, Selasa (12/7).

Selain bertemu dengan gubernur, rombongan meninjau berbagai proyek infrastruktur di Kalbar, diantaranya pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu dan Jembatan Kapuas III. Lalu meninjau Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah.

Dalam pertemuan, Gubernur Kalbar, Sutarmidji berharap kunjungan komisi V DPR RI ke Kalbar akan semakin mempercepat proses pembangunan infrastruktur yang akan dibangun dan direncanakan.

• **Baca Halaman 7**

Sutarmidji juga yakin, kunjungan tersebut tidak hanya sekedar seremonial dan eksekusi program pembangunan diharapkan bisa semakin cepat.

"Ini untuk menegaskan bahwa harus dieksekusi oleh mitra kerja Komisi V, kalau mitra (Komisi V) lama, nanti saya lapor lagi ke Komisi V DPR RI," ucap Sutarmidji.

Menurut Sutarmidji dalam kunjungan tersebut berbagai hal dibahas, termasuk terkait pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu. Hingga saat ini, progres pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu hanya tinggal groundbreaking.

"Proses pembangunan diharapkan bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian dilanjutkan dengan (pembangunan) Jalan Sultan Hamid 2. PKL itu cepat-cepat pindah, jangan sampai nanti menghambat," pinta Sutarmidji.

Selain itu menurut Midji dalam pertemuan dengan Komisi V juga dibahas terkait pembangunan Jembatan Kapuas Tiga yang saat ini Detailed Engineering Design (DED)-nya sudah hampir rampung. Selain itu yang tidak kalah pentingnya pembangunan tol Pontianak-Sungai Kunyit lalu dilanjutkan Sungai Kunyit-Singkawang.

"Saya berharap ini semuanya bisa terealisasi dengan baik, termasuk Jem-

batan Sungai Sambas Besar, progresnya tadi disampaikan Pak syarif lamban, maka itu harus cepat. Sebelum berakhir masa jabatan presiden itu sudah harus selesai, itu kan janji beliau harus selesai, kita saling ingatkan lagi," tutur Sutarmidji.

Midji juga meminta mitra kerja Komisi V DPR RI untuk dapat berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Jika menemui kendala, mitra kerja diharapkan dapat segera berkoordinasi untuk bisa diselesaikan. Ia juga memastikan tidak meminta apapun terhadap para mitra kerja komisi V DPR RI tersebut.

"Jadi mereka kerja saja yang betul, ditugaskan di Kalbar bangun Kalbar ini jangan (Kalbar) jadi batu loncatan," tegasnya.

### Bukan Sekadar Seremonial

Sementara itu Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus Lasarus menegaskan Kunker Komisi V DPR RI ke Kalbar bukan hanya kegiatan seremonial belaka. Namun sebagai upaya untuk menginventarisasi kendala yang menghambat laju percepatan pembangunan di Kalbar.

"Kunker kita bukan sekedar kegiatan seremonial. Kita ke sini pakai uang rakyat bapak ibu sekalian. Ini harus kita tindak lanjut, harus kita pertanggung jawabkan hasil kesepakatan kita di sini harus diimplementasikan," ucap anggota

DPR dari daerah pemilihan Kalbar ini.

Kunker Komisi V ke Kalbar kali ini dinilai Lasarus juga merupakan sebuah sejarah, karena selama ini menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Kalbar ini, Kunker Komisi V DPR RI tidak pernah seramai saat ke Kalbar, hal ini diharapkan dia membawa manfaat untuk Kalbar, khususnya dalam hal percepatan pembangunan.

"Ini sejarah belum pernah kunjungan komisi V sebanyak ini, mudah-mudahan membawa manfaat terutama dalam percepatan pembangunan," katanya.

Lasarus menerangkan dalam pertemuan dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji, beberapa persoalan terkait peningkatan infrastruktur dibahas.

"Kami tadi membahas banyak hal terkait dengan apa yang disampaikan pemerintah daerah, terutama jalan-jalan poros lintas utara, termasuk lintas tengah yang dari Melawi menuju ke Kalteng," ucap Lasarus.

Selain itu dalam pembahasan juga disampaikan mengenai persoalan air bersih di Pontianak, kemudian Bandara di Singkawang, dan Desa Mandiri yang terus bertambah.

"Tadi juga sempat disinggung sedikit tentang jalan tol Pontianak-Singkawang," tutur Lasarus yang



juga menjabat Ketua DPD PDIP Kalbar.

Selain beberapa masalah tersebut, lanjut Lasarus, Komisi V DPR bersama mitra kerja dan Gubernur Kalbar turut membahas mengenai progres Pelabuhan Internasional Kijing.

Terkait pelabuhan yang terletak di Kabupaten Mempawah ini, Lasarus menginginkan agar PT Pelindo, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait mampu bekerja sama untuk memaksimalkan peran pelabuhan tersebut sebagai pintu ekspor kelapa sawit.

"Suplai air untuk Pelabuhan Kijing serta pemanfaatannya untuk ekspor kelapa sawit yang sekarang belum dimaksimalkan juga kami bahas," jelasnya.

"Kami minta supaya Pelabuhan Kijing nanti dimaksimalkan untuk ekspor kelapa sawit sehingga Kalbar sebagai daerah penghasil terbesar kedua di Indonesia bisa merasakan manfaat dari keberadaan pelabuhan ini," tambah Lasarus.

Rombongan Komisi V DPR RI juga meninjau lokasi pembangunan duplikasi Jembatan Tol Satu di Kota Pontianak. Menurut Lasarus hingga saat ini progres pembangunan jembatan tersebut sudah pada tahapan pengumuman pemenang lelang proyek.

Dalam waktu dekat pemancangan tiang pertama atau groundbreaking segera

dilaksanakan menandai mulai dikerjakannya proyek pembangunan jembatan duplikasi yang berdampingan dengan jembatan yang sudah ada. "Target selesai pada 2024, jika lebih cepat maka akan lebih baik," ujarnya.

Untuk tahun ini, lanjut dia, alokasi anggaran lebih dari Rp30 miliar. Total alokasi anggaran menelan dana Rp200 miliar. Sebagaimana diketahui, Jembatan Kapuas Satu yang ada saat ini sudah melebihi kapasitas. Kemudian, dari sisi keamanan juga berbahaya, karena jembatan tersebut pernah beberapa kali ditabrak oleh kapal tongkang.

"Lalu lintas juga padat, kita berharap dengan duplikasi ini kemacetan bisa tertangani dan bisa membagi beban jembatan yang sudah ada sekarang," ungkap Lasarus.

Menurut Lasarus, duplikasi Jembatan Kapuas Satu memang mendesak untuk dibangun guna mengurangi beban jembatan yang kian hari semakin padat dilalui kendaraan. Setelah nanti rampung dibangun, keberadaan jembatan duplikasi diyakininya mampu mengurangi kemacetan di Pontianak, terutama di waktu pagi dan sore hari.

"Jembatan Kapuas Satu seperti yang kita tahu daya tampungnya sudah melebihi kapasitas. Dari sisi keamanan pun, kalau dibiarkan terlalu lama itu ber-

bahaya karena jembatan ini sudah ditabrak berkali-kali. Kemudian lalu lintas di sana kan padat sekali," jelasnya.

"Kita berharap dengan duplikasi ini dapat mengurangi kemacetan, membagi beban jembatan yang sudah ada," tutup Lasarus.

### Maksimalkan Pembangunan Pelabuhan Kijing

Sementara itu Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Syarif Abdullah Alkadrie menyoroti terkait pembangunan pelabuhan Internasional Kijing. Menurutnya yang harus diperhatikan dalam pembangunan pelabuhan Internasional Kijing yakni tangki timbun Crude Palm Oil (CPO). Pembangunan tangki timbun tersebut harus dipercepat agar ekspor bisa langsung dilakukan dari pelabuhan Internasional Kijing.

"Ini pelabuhan sangat strategis, ini menjadi harapan kita karena kita titik silang dekat dengan pelayaran luar," ucapnya.

Anggota DPR yang juga berasal dari daerah pemilihan Kalbar ini mendorong pemerintah segera mempercepat realisasi pembangunan Tol Pontianak Kijing. Pasalnya jika dilihat saat ini kondisi jalan yang ada sangat kecil. Apalagi jika ditambah dengan operasionalnya pelabuhan Internasional Kijing. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan akan menambah persoalan baru.

"Kita harapkan pemerintah pusat cepat memperluas akses jalan ini. Tahun ini ada beberapa dari Sungai Pinyuh Mempawah, Mempawah Sungai Duri sudah terprogramkan. Lalu dari Pasisir Panjang Singkawang juga telah terprogramkan untuk pelebaran," jelasnya.

Dirinya mengungkapkan beberapa program lain yang harus dilakukan percepatan yakni pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu. Pembangunan jembatan diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini dirasakan masyarakat Pontianak.

"Setiap hari selalu tanpa hari tanpa macet, sehingga kalau ini sudah terbangun duplikasinya paling tidak bisa mengurangi kemacetan itu," kata Syarif yang juga menjabat Ketua DPW Partai Nasdem kalbar ini.

Dirinya memastikan sejak awal mengawal proses pembangunan duplikasi Jembatan Kapuas Satu. Hingga saat ini pembangunan jembatan duplikasi sudah penetapan pemenang lelang. Sehingga diharapkan tidak terjadi hal yang biasa yang bisa menghentikan pembangunan.

"Saya kira pada 2023 sudah selesai, masyarakat harus mendukung setiap program pembangunan. Tanpa dukungan masyarakat tidak bisa lancar, pembangunan itu akan membantu masyarakat," tutupnya. (dir)